

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2002:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya di tandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Analisis terhadap Kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan

dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya. Disamping itu, pengukuran kinerja keuangan juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada public dengan baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – undang 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang intinya, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk urusan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Sebuah daerah yang memiliki sistem pemerintahan yang baik hendaknya secara berkala melaksanakan pertanggungjawaban kepada public baik dan menjadi suatu keharusan yang mutlak dilaksanakan. Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya optimalisasi anggaran untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan public. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pegelolaan keuangan daerah harus

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Laporan Petanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disampaikan berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Komponen Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu daerah wilayah Provinsi Nusa Tengah Timor (NTT) yang sudah menjadi daerah otonom sejak tahun 1999. Sebagai daerah otonom, Kabupaten TTU diberi kesempatan dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sejak otonom hingga saat ini belum pernah dilakukan kajian tentang Laporan Keuangan Daerah pada Kabupaten TTU. Untuk melihat Laporan Keuangan dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satunya bisa di ukur melalui kinerja / kemampuan keuangan daerah yaitu Laporan keuangan.

Untuk melihat perkembangan Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Laporan Keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2009 - 2011

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Aset			
Aset Lancar	Rp. 35,041,253,232.10	Rp.45,615,989,526.70	Rp.70,685,952,435.04
Investasi Jangka Panjang	Rp.32,505,792,680.00	Rp.37,425,444,027.96	Rp.34,669,155,555.96
Aset Tetap	Rp.927,982,058,179.61	Rp.1,155,089,335,816.00	Rp.1,233,562,349,251.00
Aset Lainnya	Rp.10,944,961,621.48	Rp.11,602,964,547.55	Rp.23,645,953,690.65
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	Rp.3,045,690,570.00	Rp.1,654,778,665.00	Rp.3,999,434,873.00
Ekuitas Dana			
Ekuitas Dana Lancar	Rp.31,995,562,662.10	Rp.43,961,210,861.70	Rp.66,686,517,562.04
Ekuitas Dana Investasi	Rp.971,432,812,481.09	Rp.1,204,117,744,391.51	Rp.1,291,877,458,479.61
Pendapatan			
Jumlah Pendapatan	Rp.412,691,472,776.90	Rp.415,598,959,624.47	Rp.495,334,253,340.99
Belanja			
Jumlah Belanja	Rp.423,239,694,510.00	Rp.403,752,896,173.00	Rp.474,223,651,161.00
Pembiayaan Daerah			
Jumlah Penerimaan	Rp.38,441,984,063.00	Rp.27,643,762,329.97	Rp.38,523,835,395.44
Jumlah Pengeluaran	Rp.250,000,000.00	Rp.1,000,000,000.00	Rp.1,540,022,400.00
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.95,406,258,052.60	Rp.71,627,575,287.47	Rp.95,023,466,363.99
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan			
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan	Rp.(107,443,622,175.00)	Rp.(61,272,309,786.00)	Rp.(74,688,960,622.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.4,523,801,572.00	Rp.449,972,797.00	Rp.(395,890,986.00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.10,329,022.00	Rp. -----	Rp.2,876,535,851.00

Sumber data: Biro Keuangan Nusa Tenggara Timur, 2013

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan perkembangan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun anggaran 2009 – 2011 mengalami fluktuasi dari ke- 3 (tiga) komponen Laporan Keuangan Daerah tersebut. Hasil audit BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yaitu : Disclaimer (tidak berpendapat). Faktor penyebab tidak berpendapat terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten TTU, yaitu : 1. Penetapan Anggaran pemerintah daerah lewat dari bulan januari tahun berjalan, 2. Pengelolaan Asset daerah tidak tertib, 3. Hasil temuan auditor (Inspektorat, BPKP, BPK) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, 4. LAKIP Bupati harus dimasukkan dalam bulan maret tahun berikutnya mengalami keterlambatan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlambat memasukkan, SPJ dari SKPD terlambat dimasukkan tanggal 31 desember harus tutup buku (wawancara dengan pegawai).

Harus disadari bahwa, banyak pihak yang akan mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan. Analisis Laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang dianalisis disajikan dengan benar dan dapat diandalkan. Jika laporan

keuangan disajikan secara buruk maka akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan dan akan berdampak buruk juga terhadap kinerja pemerintah selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 – 2011 “.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah “ Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 – 2011”?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 – 2011 .

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai masukan untuk mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi pembaca pada umumnya, sebagai bacaan yang berguna untuk memperluas wawasan tentang keuangan daerah khususnya keuangan pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.